List of Tax & Customs Regulation August Period II-2025			
No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	PMK Nomor 60 Tahun 2025	15-Aug-25	Insentif tambahan PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yg ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025
2	Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 722 Tahun 2025	15-Aug-25	Pengurangan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan dan makanan dan/atau minuman
3	PER-16/PJ/2025	13-Aug-25	Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-6/PJ/2025 tentang pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta Special Purpose Company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah
4	PER-15/PJ/2025	5-Aug-25	Batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan pihak lain utk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh atas penghasilan yg diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik
5	PMK Nomor 54 Tahun 2025	25-Jul-25	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
6	PMK Nomor 53 Tahun 2025	25-Jul-25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
7	PMK Nomor 52 Tahun 2025	25-Jul-25	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan
8	PMK Nomor 51 Tahun 2025	25-Jul-25	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
9	PMK Nomor 50 Tahun 2025	25-Jul-25	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
10	PMK Nomor 45 Tahun 2025	16-Jul-25	Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara
11	PMK Nomor 44 Tahun 2025	16-Jul-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
12	PER-13/PJ/2025	14-Jul-25	Piagam Wajib Pajak
13	PER-8/BC/2025	30-Jun-25	Tata laksana Ekspor barang kiriman
14	Permendag Nomor 17 Tahun 2025	30-Jun-25	Kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil
15	Permendag Nomor 16 Tahun 2025	30-Jun-25	Kebijakan dan Pengaturan Impor
16	KEP-116/BC/2025	26-Jun-25	Penerapan secara penuh (mandatory) Ceisa 4.0 tahap kedua/ulhasatu
17	PENG-2/PJ/2025	24-Jun-25	Imbauan antigratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025
18	PENG-29/PJ/2025	20-Jun-25	Waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak
19	23/KM.4/2025	13-Jun-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar
20	PMK Nomor 37 Tahun 2025	11-Jun-25	Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik

21	Perpre Nomor 68 Tahun 2025	5-Jun-25	Sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri
22	PMK Nomor 36 Tahun 2025	4-Jun-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
23	PMK Nomor 34 Tahun 2025	26-May-25	Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 34 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
24	PER-12/PJ/2025	22-May-25	Batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan pihak lain, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
25	PER-11/PJ/2025	22-May-25	Ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPNBM dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
26	PER-10/PJ/2025	22-May-25	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
27	PER-9/PJ/2025	22-May-25	Penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah
28	PER-8/PJ/2025	21-May-25	Ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi perpajakan
29	PER-7/PJ/2025	21-May-25	Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
30	PER-6/PJ/2025	21-May-25	Pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah
31	PMK Nomor 29 Tahun 2025	14-May-25	Pengenaan Bea Masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk Expansible Polystyrene
32	SE-7/PJ/2025	2-May-25	Pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia
33	PER-5/PJ/2025	2-May-25	Penyedia jasa aplikasi perpajakan
34	KEP-73/BC/2025	2-May-25	Penetapan secara [penuh (Mandatory) CEISA 4.0 tahap kedua]
35	20/KM.4/2025	30-Apr-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar
36	PER-4/PJ/2025	29-Apr-25	Perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-25/PJ/2020 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan pajak terutang, nota penghitungan, surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan, serta surat tagihan pajak PBB
37	19/KM.4/2025	29-Apr-25	Penundaan pelaksanaan pengawasan ketentuan pembatasan impor dan ekspor berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 18/KM.4/2025 tentang barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan karantina indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

38	18/KM.4/2025	21-Apr-25	Barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan karantina indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
39	KEP-66/BC/2025	19-Apr-25	Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap kesembilan belas
40	PMK Nomor 27 Tahun 2025	14-Apr-25	Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia
41	PMK Nomor 25 Tahun 2025	14-Apr-25	Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan
42	17/KM.4/2025	14-Apr-25	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
43	PER-3/PJ/2025	27-Mar-25	Perubahan keempat atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2022 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
44	KEP-79/PJ/2025	25-Mar-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 29 yg terutang dan/atau penyampaian SPT PPh Orang Pribadi utk tahun pajak 2024 sehubungan dgn hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka hari suci nyepi dan hari raya idul fitri
45	PENG-23/PJ.09/2025	25-Mar-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi utk tahun pajak 2024
46	10/KM.4/2025	21-Mar-25	Penetapan Jenis Satuan Barang Berupa Komoditas Expansible Polystyrene (EPS) dan Nylon Film yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor
47	PER-5/BC/2025	14-Mar-25	Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
48	8/KM.4/2025	13-Mar-25	Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
49	4/KM.4/2025	12-Mar-25	Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor
50	6/KM.4/2025	12-Mar-25	Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
51	PMK Nomor 21 Tahun 2025	6-Mar-25	Pengenaan Bea Masuk antidumping terhadap impor produk nylon film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan
52	PER-4/BC/2025	4-Mar-25	Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone
53	PENG-20/PJ.09/2025	3-Mar-25	Kebijakan selama Ramadan 1446 H dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2024
54	PER-3/BC/2025	28-Feb-25	Standar audit kepabeanan dan audit cukai
55	PER-2/BC/2025	28-Feb-25	Tata laksana audit kepabeanan dan audit cukai
56	PENG-19/PJ.09/2025	27-Feb-25	Ralat PENG-18/PJ.09/2025 ttg kebijakan penghapusan sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau
57	PMK Nomor 18 Tahun 2025	27-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025
58	KEP-67/PJ/2025	27-Feb-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yg terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dgn implementasi coretax
59	PMK Nomor 17 Tahun 2025	19-Feb-25	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
60	KT No.6/2025	13-Feb-25	Penerbitan faktur pajak

61	KEP-54/PJ/2025	12-Feb-25	Penetapan PKP tertentu
62	PENG-13/PJ.09/2025	12-Feb-25	Pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur client desktop
63	PMK Nomor 15 Tahun 2025	10-Feb-25	Pemeriksaan pajak
64	PMK Nomor 14 Tahun 2025	4-Feb-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik
65	PMK Nomor 13 Tahun 2025	4-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
66	PMK Nomor 12 Tahun 2025	4-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
67	PMK Nomor 11 Tahun 2025	4-Feb-25	Ketentuan Nilai Lain sbg DPP dan besaran tertentu PPN
68	PMK Nomor 10 Tahun 2025	4-Feb-25	PPH 21 atas penghasilan tertentu yg ditanggung Pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun 2025
69	KT-05/2025	4-Feb-25	Pembaruan informasi terkini implementasi coretax DJP
70	SE-1/PJ/2025	24-Jan-25	Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas komisi reasuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang diterima atau diperoleh perusahaan pialang reasuransi sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian
71	PMK Nomor 9 Tahun 2025	24-Jan-25	Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina
72	PMK Nomor 8 Tahun 2025	24-Jan-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)
73	PENG-1/PJ/2025	24-Jan-25	Daftar yuridiksi partisipan dan yuridiksi pelaporan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of financial account information/AEOI) tahun 2025
74	PMK Nomor 7 Tahun 2025	21-Jan-25	Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
75	PENG-9/PJ.09/2025	21-Jan-25	Pelaporan SPT Tahunan PPH
76	KEP-24/PJ/2025	15-Jan-25	Penetapan PKP tertentu
77	KT-03/2015	13-Jan-25	Keterangan Tertulis ttg perkembangan coretax DJP
78	PENG - 1/PJ.09/2025	8-Jan-25	Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktur Jenderal Pajak
79	PMK Nomor 4 Tahun 2025	6-Jan-25	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
80	PER-1/PJ/2025	3-Jan-25	Petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
81	PMK Nomor 136 Tahun 2024	31-Dec-24	Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
82	PMK Nomor 135 Tahun 2024	31-Dec-24	Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
83	PMK Nomor 131 Tahun 2024	31-Dec-24	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
84	PMK Nomor 119 Tahun 2024	23-Dec-24	Perubahan ketiga PMK 39/PMK.03/2018 ttg tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
85	PMK Nomor 118 Tahun 2024	23-Dec-24	Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan
86	PMK Nomor 117 Tahun 2024	23-Dec-24	Tata cara penghapusan piutang pajak
87	PMK Nomor 114 Tahun 2024	23-Dec-24	Audit Kepabeanan dan Audit Cukai